

# KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

A

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 26 Agustus 2016 No. 68

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

# PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA: PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

## I. DATA PRIBADI

1. Nama : Drs.ADI WARYANTO

2. Jabatan : INSPEKTUR

3. Alamat Kantor : Jl. SOEKARNO HATTA NO. 59, MAGELANG

4. Tanggal Pelaporan : 23 Desember 2014

# II. DATA HARTA

- A. HARTA TIDAK BERGERAK .....Rp. 225.000.000
  (TANAH DAN BANGUNAN)
  - Tanah seluas 1.663 m2 , di Kabupaten PURWOREJO, yang berasal dari WARISAN, perolehan tahun 2002 NJOP Rp.50.000.000
  - Tanah seluas 630 m2, di Kabupaten MAGELANG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2012 NJOP Rp.50.000.000
  - Tanah & Bangunan seluas 292 m2 & 126 m2, di Kabupaten MAGELANG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2001 sampai dengan 2005 NJOP Rp.125.000.000

## B. HARTA BERGERAK

- a. ALAT TRANSPORTASI .....Rp. 20.000.000
  DAN MESIN LAINNYA
- Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2006, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2006 nilai jual Rp.5.000.000
- Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2014, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2014 nilai jual Rp.15.000.000

.....Rp.

.....Rp.

Rp.

387.778.364

24.000.000

363,778,364

1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp.23.639.164

1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG sebesar Rp.24.000.000

LAINNYA

TOTAL HARTA (II)

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN ( II - III )

E. PIUTANG

III. HUTANG

216257

Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 26 Agustus 2016 No.68



#### Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis